















Geneva Network, United Kingdom



Institute for Democracy and Economic Affairs, Malaysia



Minimal Government Thinkers, Philippines



Paramadina Public Policy Institute, Indonesia



Siam Intelligence Unit, Thailand



Viet Nam Institute for Economic and Policy Research

DAFTAR ISI

Ringkasan	1
Ringkasan Rekomendasi	2
Pengantar - Mengapa Kekayaan Intelektual Strategis Untuk Negara ASEAN	3
Membangun Ekonomi Berbasis Pengetahuan Negara ASEAN	5
Peran Kekayaan Intelektual Dalam Pembangunan Ekonomi	7
Status Perlindungan Kekayaan Intelektual Di ASEAN	9
Prinsip-Prinsip Bagi Sistem Kekayaan Intelektual Berstandar Tinggi	12
Paten	13
Pemeriksaan Paten Yang Efisien Dan Tepat Waktu	13
Penghargaan Paten Bagi Temuan Bermanfaat	15
Menyediakan Kejelasan Atas Penggunaan Lisensi Wajib	17
Hak Cipta	19
Prinsip-Prinsip Reformasi	20
Merek Dagang	21
Prinsip-Prinsip Reformasi	23
Rahasia Dagang	25
Prinsip-Prinsip Reformasi	25
Perlindungan Data Resmi	27
Prinsip-Prinsip Reformasi	27
Referensi	29

Ringkasan

- Untuk mengamankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai status pendapatan tinggi, negara-negara ASEAN perlu beralih dari manufaktur dasar dan ekspor komoditas ke inovasi dan barang dan layanan berbasis pengetahuan yang bernilai lebih tinggi. Untuk mencapai hal ini, negara-negara ASEAN perlu mengintegrasikan lebih dalam ke dalam jaringan Penelitian dan Pengembangan (R&D) global serta rantai nilai pabrikan, yang semakin berbasis pengetahuan.
- Kerangka kerja yang kuat untuk perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi kunci untuk transisi ini, karena perlunya kepastian kepada investor asing, yang membawa serta pengetahuan, teknologi, dan kapasitas teknis yang berharga. Hak Kekayaan Intelektual yang Kuat (HKI) juga membantu bisnis dan pengusaha lokal mengembangkan barang dan jasa, dan masuk ke dalam aliansi dan kemitraan lintas-batas.
- Negara-negara ASEAN berada pada posisi yang tepat untuk meningkatkan rantai nilai dan menjadi lebih inovatif, berkat sumber daya manusia yang kuat serta kekuatan dan kemampuan mereka.
- Dalam rangka membangun di atas kekuatan yang cukup besar ini dan mempercepat transisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan yang lebih inovatif, pemerintah ASEAN harus mereformasi sistem Kekayaan Intelektual mereka ke standar global tertinggi. Proses ini sudah dimulai, tetapi masih ada jarak yang harus ditempuh.
- Menurut indeks perbandingan internasional, kekuatan, ruang lingkup dan efisiensi kerangka Kekayaan Intelektual¹ di Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand dan Filipina masih jauh di bawah standar global tertinggi.
- Laporan kami mengidentifikasi masalah utama dalam kerangka kerja Kekayaan Inteletual negara-negara ini dan membuat tawaran kebijakan untuk reformasi.
- Paten. Ketika negara-negara ASEAN bergeser dari manufaktur bernilai rendah ke manufaktur bernilai tambah dan kegiatan litbang di sektor berbasis pengetahuan, kerangka kerja yang kuat untuk perlindungan dan penegakan paten sangat penting. Paten merupakan pusat dari model bisnis sektor industri bernilai tinggi, termasuk ilmu kehidupan, semikonduktor, pembuatan semua jenis peralatan dan peralatan elektronik, dan ekstraksi gas alam. Negara-negara ASEAN harus fokus pada bidang-bidang berikut:
 - Keterlambatan dalam memeriksa paten: Semua negara ASEAN dalam laporan ini merusak nilai paten melalui penundaan dan simpanan di kantor paten nasional mereka, yang memakan waktu dua puluh tahun dari paten. Penundaan di Thailand terparah.
 - Pemberian paten untuk penemuan yang bermanfaat: Indonesia dan Filipina telah menciptakan ketidakpastian dalam sistem paten mereka dengan membuatnya lebih sulit untuk mendapatkan paten untuk berbagai inovasi penting.
 - Kejelasan tentang penggunaan lisensi wajib: Malaysia, Indonesia dan Filipina telah menunjukkan kesediaan untuk mengeluarkan lisensi wajib untuk paten obat-obatan, menciptakan ketidakpastian besar dalam kerangka kerja HKI mereka.

Penggunan istilah Kekayaan Intelektual akan digunakan secara bergantian dengan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) atau IPR (*Intellectual Property Rights*) atau IP. Walupun pemahaman konteks tetap diperlukan.

- Hak cipta menjadi sangat penting untuk industri kreatif dan TIK ASEAN yang sedang berkembang, namun pelanggaran hak cipta tersebar luas, khususnya online. Meskipun beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan undang-undang hak cipta mereka, penegakannya sulit. Seringkali tidak ada bantuan tambahan yang memungkinkan pemegang hak untuk menonaktifkan konten pelanggar ajudikasi dapat tertunda secara online, dan kurangnya mekanisme untuk memungkinkan kerjasama antara pihak berwenang dan pemegang hak terhadap pembajakan online.
- Merek Dagang. Terlepas dari pentingnya perlindungan merek dagang yang kuat untuk bisnis lokal dan pengembangan ekonomi, merek dagang secara rutin dilanggar di seluruh ASEAN dengan barang palsu yang tersedia di berbagai produk termasuk barang konsumen, semi-konduktor dan elektronik, suku cadang, bahan kimia, barang IT, barang-barang mewah, obat-obatan dan makanan dan minuman. Sementara banyak negara baru-baru ini memperkuat undang-undang merek dagang, hambatan hukum dan prosedural masih ada untuk mengamankan hak merek dagang. Pejabat pabean juga sering kali tidak memiliki wewenang untuk bertindak terhadap pelanggaran barang dalam perjalanan.
- Rahasia Dagang. Ketika bisnis semakin terdigitasi, undang-undang rahasia dagang sangat penting untuk melindungi perusahaan dari pencurian pengetahuan, rencana, informasi teknis, dan pelanggan yang sangat berharga. Pemerintah ASEAN telah mengakui pentingnya undang-undang rahasia dagang bagi ekosistem inovasi keseluruhan dan telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki undang-undang di bidang ini.
- Perlindungan Data Resmi. Data yang dihasilkan selama uji klinis untuk obatobatan, obat-obatan hewan dan bahan kimia pertanian sangat berharga, dan perlindungannya dari penggunaan oleh pesaing merupakan bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual yang semakin penting. Sebagian besar negara-negara ASEAN tidak menyediakan cukup perlindungan untuk data ini, atau tidak ada sama sekali. Ini menghambat kemampuan perusahaan-perusahaan ASEAN untuk berpartisipasi dalam jaringan Penelitian dan pengembangan (Selanjutnya disebut R&D) global dan manufaktur berteknologi tinggi.

Ringkasan rekomendasi

- Menempatkan Kekayaan Intelektual yang kuat di pusat pengembangan ekonomi nasional dan strategi promosi investasi
- Mempercepat pemeriksaan paten
- Tidak mendiskriminasi teknologi spesifik dalam pemberian paten
- Membatasi penggunaan lisensi wajib paten untuk keadaan darurat
- Memperkuat penegakan hak cipta, khususnya online

- Memungkinkan pengadilan dan pejabat untuk bertindak terhadap barang-barang yang melanggar merek dagang, termasuk barang yang sedang transit antar negara
- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan rahasia dagang di kalangan komunitas bisnis
- Memberikan persyaratan perlindungan data peraturan yang memadai untuk obatobatan, obat-obatan hewan dan bahan kimia pertanian

Pengantar -Mengapa Kekayaan Intelektual Strategis Untuk Negara ASEAN

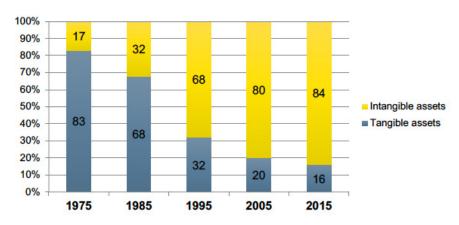
Ekonom bersepakat bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tergantung pada nilai yang lebih tinggi, layanan berbasis pengetahuan, manufaktur teknologi tinggi, penelitian dan pengembangan, dan lebih sedikit ketergantungan pada ekspor komoditas dan sumber daya alam. Sektor-sektor manufaktur domestik di negaranegara anggota ASEAN, meskipun semakin beragam, sebagian besar difokuskan pada perakitan produk yang dirancang dan diproduksi di tempat lain. Ada juga terlalu banyak ketergantungan pada ekspor sumber daya alam. Agar negara-negara ASEAN dapat bergabung dengan jajaran negara-negara berpenghasilan tinggi, mereka harus terus berkomitmen dan berinvestasi dalam pembangunan ekonomi pengetahuan.

Industri-industri yang dipimpin oleh inovasi seperti biofarmasi, teknologi informasi, bahan kimia, dan hiburan menopang pertumbuhan serta pekerjaan yang berkelanjutan di ekonomi sebagian besar negara-negara berpenghasilan tinggi. Misalnya ekonomi Amerika Serikat. Pada tahun 1975, 83 persen dari 500 perusahaan terbesarnya berfokus pada "aset berwujud" di bidang manufaktur, pertanian, dan komoditas. Sangat mirip dengan negara-negara ASEAN saat ini (dengan pengecualian Singapura).

Hari ini, kebalikannya benar. Pada 2015, 85 persen dari nilai perusahaan-perusahaan ini berasal dari "aset tidak berwujud". Sederhananya, perusahaan AS yang paling sukses menghasilkan hampir semua uang mereka melalui ide, konsep, merek, dan produk serta proses inovatif (Gambar 1). Ekonomi Asia yang maju - Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura dan Taiwan - juga telah mengambil jalan ini, bergerak selama beberapa dekade terakhir dari pertanian ke manufaktur ke industri berbasis pengetahuan.

Gambar 1: Perusahaan Terbesar di Amerika Serikat Semakin Berbasis Pengetahuan

Components of S&P 500 market value



Sumber: Ocean Tomo

Negara-negara ASEAN tidak lagi dapat bergantung pada upah rendah, manufaktur padat karya untuk keunggulan kompetitif mereka, terutama dalam konteks kenaikan upah yang cepat di negara-negara seperti Thailand dan Malaysia, serta meningkatnya tingkat otomatisasi. Pengembangan sektor dan proses yang berorientasi pada pengetahuan akan menjadi sangat penting bagi negara-negara ASEAN untuk melanjutkan transisi ekonomi mereka.

Keterbukaan ekonomi dan kolaborasi internasional adalah kuncinya. Beberapa negara telah mengembangkan industri berbasis pengetahuan yang berkembang murni dari sumber daya domestik. Saat ini, pengetahuan ilmiah, keterampilan teknologi, dan modal R&D yang diperlukan tersebar secara global. Bukan lagi kasus perusahaan R&D yang "terintegrasi secara vertikal", misalnya raksasa industri General Electric atau raksasa teknologi Samsung, meneliti, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan produk di rumah dari awal hingga selesai. Saat ini, perusahaan multinasional berkolaborasi dengan perusahaan kecil, akademisi dan sektor publik di semua tahap siklus R&D, lintas batas dan benua. Sementara itu, produk-produk teknologi tinggi yang inovatif semakin diproduksi oleh beberapa perusahaan di berbagai negara dalam rantai nilai manufaktur global. Rantai nilai global ini telah menciptakan barang-barang konsumsi yang lebih murah dan mengurangi kemiskinan dengan membantu mengintegrasikan negara-negara berkembang ke dalam ekonomi global.

Tantangan bagi negara-negara ASEAN menjadi peserta yang lebih berarti dalam jaringan inovasi global dan rantai nilai pabrikasi yang intensif pengetahuan. Untuk meningkatkan kapasitas inovasi mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi, negara-negara ASEAN perlu lebih banyak menarik perusahaan-perusahaan multinasional yang inovatif ke negara mereka untuk melakukan R&D dan membangun kapasitas manufaktur berteknologi tinggi, membawa serta modal, keterampilan, dan keterampilan teknologi yang hilang secara lokal.

Potensi hadiahnya sangat besar. Cina sekarang menangkap lebih banyak investasi asing langsung dalam R&D daripada AS. Sektor farmasi memimpin dengan investasi berjumlah \$ 1,6 miliar antara 2010 dan 2015, menurut Pasar Penanaman Modal Asing. Modal tidak berwujud, pengetahuan-intensif menyumbang sepertiga dari nilai semua barang yang diproduksi secara global antara tahun 2000 dan 2014, menurut *World Intellectual Property Right Organization* (WIPO).

Sementara pajak, peraturan dan kebijakan keterampilan semuanya memainkan peran penting dalam pengembangan ekosistem inovasi nasional, baik investor lokal maupun asing memerlukan kepastian atas hak kekayaan intelektual mereka, termasuk hak paten, merek dagang, dan hak cipta yang jelas dan mudah ditegakkan. Jika perlindungan ini lemah atau penegakan hukumnya buruk, perusahaan lokal tidak akan berinvestasi dalam mengembangkan teknologi baru dan hasil kreatif mereka sendiri, sementara perusahaan internasional kecil kemungkinannya untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal untuk litbang atau manufaktur.

Sangat penting bagi negara-negara ASEAN pada awal perjalanan inovasi mereka, kerangka kerja yang tidak memadai untuk perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual berarti akan ada lebih sedikit peluang untuk berpartisipasi dalam rantai nilai pabrikasi yang intensif pengetahuan, dan akibatnya hilangnya transfer teknologi, pekerjaan dan ekonomi pertumbuhan. Ketidakpastian tentang hak-hak masyarakat adat juga akan menunda peluncuran produk, layanan, dan obat-obatan inovatif, yang menghalangi warga negara untuk mengakses teknologi baru, obat-obatan dan potensi peningkatan produktivitas mereka.

Laporan ini merupakan kolaborasi antara lima lembaga think tank ASEAN dari Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Thailand. Ini menjadikan kerangka kerja yang kuat tentang hak kekayaan intelektual sebagai landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ini memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan kerangka Kekayaan Intelektual masing-masing negara, dan membuat saran untuk reformasi.

Membangun Ekonomi Berbasis Pengetahuan Negara ASEAN

Meskipun negara-negara ASEAN menemukan diri mereka pada tahap perkembangan yang berbeda, negara-negara ASEAN berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan pertumbuhan jaringan inovasi global dan rantai nilai manufaktur. Menurut Lembaga Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur.

- **Singapura** adalah pemimpin regional dalam "fase terdepan" inovasi, berkat kemampuan R&D yang kuat.
- Malaysia dan Thailand berada dalam "fase catch-up" dan memiliki potensi signifikan untuk menumbuhkan kemampuan inovasi mereka yang sudah tinggi seiring dengan pertumbuhan ekonomi mereka.
- Filipina, Indonesia dan Vietnam telah membuat kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam hal ekspor barang-barang berteknologi tinggi dan barang-barang kreatif. Negara-negara ini berada dalam fase inovasi 'pembelajaran', yang ditandai dengan perolehan kemampuan inovasi. Potensi untuk inovasi masa depan dari negara-negara ini sangat tinggi.

Negara-negara ASEAN berkinerja semakin baik dalam hal hasil inovasi, dengan Malaysia dan Vietnam tahun ini memasuki sepertiga teratas negara paling inovatif di dunia (Gambar 2).

Gambar 2: Peringkat Output Inovasi

Overall rank	Country	Score
1	Switzerland	63.5
2	Netherlands	57.5
3	Sweden	56.9
4	United Kingdom	54.4
5	China	52.8
6	United States of America	52.6
7	Finland	51.6
8	Israel	51.6
9	Germany	51.1
10	Ireland	50.1
15	Singapore	44.6
37	Viet Nam	33.9
39	Malaysia	32.4
42	Philippines	30.7
43	Thailand	30.7
78	Indonesia	20.8
84	Cambodia	19.7
120	Brunei Darussalam	13.0

Sumber: 2019 Global Innovation Index

Negara-negara anggota ASEAN memiliki potensi besar untuk perbaikan di masa depan berkat kekuatan dan keberhasilan mereka yang ada dalam kerangka kerja kebijakan, sumber daya manusia dan kekuatan sektoral tertentu. Gambar 3 menunjukkan kekuatan spesifik dari negara-negara ASEAN dalam inovasi, menunjukkan bidang kemampuan yang dapat dimanfaatkan ketika ekonomi berkembang.

Gambar 3: Kekuatan Inovasi ASEAN



Sumber: Adaptasi dari 2019 Global Innovation Index

Peran Kekayaan Intelektual Dalam Pembangunan Ekonomi

Untuk membangun di atas kekuatan besar mereka yang diilustrasikan pada Gambar 3 di atas maka negara-negara ASEAN memerlukan insentif kebijakan yang tepat. Walaupun pajak, regulasi, dan infrastruktur semuanya penting, kekayaan intelektual sangat penting untuk mendorong inovasi dan industri berbasis pengetahuan karena tiga karakteristik berbeda:

- Industri berbasis pengetahuan bersaing dengan menciptakan produk dan layanan generasi berikutnya, daripada bersaing pada harga dan komodifikasi.
- Industri berbasis pengetahuan dicirikan oleh biaya tetap awal yang sangat tinggi (misalnya *R&D* dan desain), tetapi biaya produksi marjinal yang relatif rendah.
- Industri berbasis pengetahuan mewujudkan dan bergantung pada kekayaan intelektual untuk membenarkan investasi berisiko dalam inovasi.

Dengan demikian, kekayaan intelektual semakin vital karena perdagangan global menjadi lebih banyak tentang produk dan layanan "tidak berwujud", berdasarkan pada upaya penelitian dan pengembangan, merek, dan teknologi yang dipatenkan atau dilisensikan, daripada tentang memindahkan barang fisik dari titik pabrikannya ke pelanggan di negara lain. Peran yang memungkinkan dari HKI dijelaskan secara lebih khusus di bawah ini.

- IPR mendorong inovasi: membandingkan tingkat perlindungan kekayaan intelektual (melalui laporan Daya Saing Global Forum Ekonomi Dunia) dan output kreatif (melalui Indeks Inovasi Global) menunjukkan bahwa negara-negara dengan perlindungan IP yang lebih kuat memiliki output yang lebih kreatif (dalam hal aset tidak berwujud dan barang dan jasa kreatif dalam media, percetakan dan penerbitan, dan industri hiburan suatu negara, termasuk online), bahkan pada berbagai tingkat perkembangan (ITIF, 2019). Bukti menunjukkan bahwa perlindungan paten yang kuat dalam yurisdiksi tertentu tidak hanya menarik ekspor yang kaya teknologi ke dalam yurisdiksi itu, tetapi, dalam jangka panjang, mempromosikan inovasi asli oleh perusahaan yang berlokasi di yurisdiksi itu (asalkan telah mencapai tingkat perkembangan ekonomi tertentu) (Qian 2006; Hu dan Png, 2013).
- Intellectual Property (IP) mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem IP adalah pendorong signifikan kompetisi dan pertumbuhan ekonomi di ekonomi modern berbasis pengetahuan. Inovasi bertanggung jawab atas hampir tiga perempat dari tingkat pertumbuhan A.S. setelah Perang Dunia II, bersama dengan manfaat tambahan seperti pekerjaan bergaji tinggi (Departemen Perdagangan AS, 2010).
- Hak Kekayaan Intelektual membantu negara berpartisipasi lebih bermakna dalam rantai nilai global. Barang-barang semakin banyak diproduksi di banyak negara yang berbeda, dengan semakin banyaknya nilai ekonomi mereka yang disebabkan oleh modal berbasis pengetahuan. Hak kekayaan intelektual memungkinkan negara untuk menarik investasi ke dalam manufaktur berteknologi tinggi, sehingga mempercepat langkah hulu dari manufaktur dasar.

- Paten mempromosikan persaingan dengan berbagi pengetahuan di balik penemuan dengan dunia. Aplikasi paten, yang harus mencakup informasi terperinci tentang produk dan proses baru, dapat dicari secara bebas oleh publik bahkan sebelum paten berakhir. Pengungkapan ini mempercepat inovasi dan memberdayakan pesaing potensial untuk merancang sekitar penemuan tanpa "re-inventing the wheel". Salah satu contohnya adalah banyaknya penyembuhan Hepatitis C baru yang telah dipatenkan yang telah diluncurkan sejak 2013, memberikan pilihan dan persaingan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang terapi ini.
- Perlindungan kekayaan intelektual yang kuat mendorong Investasi Asing Langsung, mengutip studi OECD menemukan bahwa peningkatan satu persen dalam kekuatan perlindungan paten setara dengan peningkatan hampir tiga persen dalam FDI di semua negara (Park dan Lippoldt, 2008).
- HKI mempromosikan difusi internasional teknologi baru. Penguatan HKI di negaranegara khususnya yang berkaitan dengan paten dikaitkan dengan peningkatan transfer teknologi melalui perdagangan dan investasi (Park dan Lippoldt, 2009; Maskus 2014). Tingkat perlindungan kekayaan intelektual suatu negara sangat mempengaruhi apakah perusahaan asing akan mentransfer teknologi ke dalamnya (Maskus 2012). Sejumlah analisis ekonometrik telah menemukan bahwa perlindungan IP yang lebih kuat dikaitkan dengan peluncuran obat baru yang lebih cepat di dalam negeri; dan sebaliknya, hak IP yang lemah dikaitkan dengan penundaan peluncuran obat baru selama bertahun-tahun (Lanjouw, 2005; Borrell, 2005; Kyle & Qian, 2014; Cockburn, Lanjouw, & Schankerman, 2016)
- HKI membantu perusahaan baru dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengamankan investasi. HKI sangat penting bagi pemula, yang cenderung memiliki sedikit aset dan membutuhkan investor. Paten adalah sinyal dan jaminan nilai karena meningkatkan keuntungan yang diharapkan dari suatu proyek, paten juga memberikan sinyal kualitas inovasi dan dapat memberikan aset penyelamatan jika perusahaan gagal. Bukti menunjukkan, misalnya, bahwa perusahaan modal ventura lebih mungkin berinvestasi dalam bioteknologi baru jika mampu mengamankan modal intelektualnya dengan portofolio paten yang kuat (Cao & Po-Hsuan, 2010).

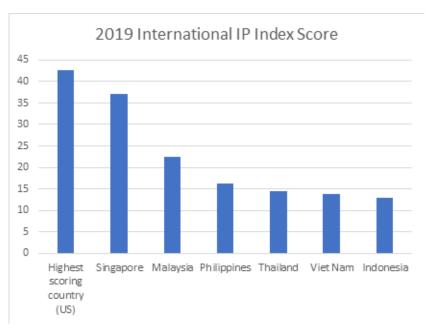
Status Perlindungan Kekayaan Intelektual di ASEAN

ASEAN telah lama mengidentifikasi peran penting HKI untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosialnya. Ini telah mengidentifikasi IP sebagai elemen mendasar dari Cetak Biru.

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, yang menetapkan langkah-langkah spesifik yang harus diambil oleh negara-negara anggota untuk mengubah ASEAN menjadi wilayah yang sangat inovatif dan kompetitif. Agenda reformasi mencakup peningkatan kantorkantor IP nasional, kerja sama teknis dan kebijakan yang lebih besar dan harmonisasi, dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya IP (Masyarakat Ekonomi ASEAN Cetak Biru 2025).

Demikian juga, banyak negara anggota ASEAN telah mengakui pentingnya HKI untuk tujuan pembangunan ekonomi dan sosial mereka dan telah berkomitmen untuk mereformasi kebijakan dan undang-undang di bidang yang penting ini. Thailand terkenal dalam hal ini untuk dukungan politik tingkat tinggi yang telah ditempatkan di belakang peningkatan sistem HKI-nya, dengan Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri memimpin Komite Nasional Kebijakan Kekayaan Intelektual dan sebuah subkomite tentang penegakan hukum perlindungan IP (Mahanakorn Partners , 2018).

Namun demikian, masih ada perjalanan jauh sebelum negara-negara ASEAN mendapat manfaat dari kerangka kerja IP dengan standar global tertinggi. Menurut indeks perbandingan internasional, kekuatan, ruang lingkup dan efisiensi kerangka IP di Malaysia, Indonesia, Vietnam dan Filipina masih jauh di bawah standar global tertinggi (Gambar 4 dan 5), meskipun ada peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 4 Indeks Skor Internasional IP

Gambar 5



- Malaysia telah memperkuat undang-undang IP tertentu sejak 2011. Secara khusus, reformasi hak cipta telah meningkatkan lingkungan Malaysia untuk seniman kreatif dan pengembang perangkat lunak. Tetapi masalah-masalah utama tetap ada, termasuk ketersediaan yang relatif luas dari produk-produk bajakan dan palsu di Malaysia, tingginya tingkat pembajakan melalui Internet, dan berlanjutnya kekhawatiran atas lisensi wajib paten obat-obatan. Perubahan hukum paten yang akan datang akan menjadi ujian bagi komitmen Malaysia terhadap inovasi.
- Kerangka perlindungan IP Filipina telah diperkuat dalam beberapa tahun terakhir, menempatkannya di atas Thailand dan Indonesia. Namun, lemahnya penegakan hukum terus menjadi masalah. Pelanggaran IP tidak dianggap sebagai kejahatan serius dan karenanya sering menjadi prioritas rendah bagi pihak berwenang dan peradilan. Paten sains kehidupan menjadi semakin sulit diperoleh dan ada kekhawatiran bahwa lisensi wajib dapat menjadi lebih banyak digunakan.
- Thailand memegang posisi yang relatif rendah dalam indeks IP internasional, yang mencerminkan sistem penegakan hukum untuk kekayaan intelektual yang tidak memadai. Amandemen UU Kejahatan Komputer tahun 2007 dan Pengadilan Banding Khusus mencerminkan komitmen baru oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang terkait dengan meningkatnya pelanggaran konten online. Thailand telah mengalami keterlambatan ekstrem dalam pemeriksaan paten, sesuatu yang sudah mulai ditangani pemerintah melalui reformasi ke kantor paten. Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri telah memimpin berbagai komite IP nasional, yang mencerminkan komitmen politik yang serius untuk meningkatkan perlindungan HKI.

- Indonesia memiliki banyak alasan untuk kinerja perlindungan IP yang rendah. Indonesia secara geografis terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, yang membuatnya sulit untuk mengontrol perbatasannya dan mencegah potensi pelanggaran HKI. Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan lain, termasuk mekanisme penegakan hukum yang tidak efektif, dan kerangka kerja yang tidak memadai untuk perlindungan dan penegakan paten ilmu hayati. Namun, beberapa langkah signifikan sedang diambil untuk meningkatkan lingkungan IP Indonesia, termasuk undang-undang baru tentang merek dagang dan peningkatan pada lembaga dan institusi penegakan HKI. Perubahan undang-undang paten yang potensial adalah peluang untuk memperbaiki masalah di masa lalu dan selanjutnya meningkatkan perlindungan dan penegakan IP.
- Sistem IP Vietnam telah mengalami peningkatan pesat selama sepuluh tahun terakhir, meskipun masih ada kesenjangan dan tantangan dalam penegakan paten dan hak cipta (khususnya online). Ada tingkat pemalsuan fisik yang tinggi dan pelanggaran online dengan perkiraan tingkat pembajakan perangkat lunak sebesar 74%. Penegakan paten ilmu kehidupan menjadi perhatian. Namun, kerangka kerja perlindungan IP dan penegakan hukum dasar sudah ada, dengan hukuman yang lebih kuat sekarang berlaku untuk pelanggaran skala komersial. Pemerintah Vietnam sedang mengejar strategi IP yang mengintegrasikan Vietnam ke dalam kerangka IP global, dan berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengoordinasikan upaya penegakan IP domestik dengan lebih baik di antara berbagai lembaga.

Prinsip-Prinsip Bagi Sistem Kekayaan Intelektual Berstandar Tinggi

Seperti yang telah ditekankan oleh laporan ini, ada banyak alasan positif untuk meningkatkan kualitas kerangka kerja keseluruhan untuk perlindungan HKI. Menurut Pusat Kebijakan Inovasi Global, negara-negara di sepertiga teratas dari peringkat Indeks IP Internasional adalah 38% lebih mungkin untuk mendapatkan pendanaan inovasi dan 39% lebih mungkin untuk menarik investasi asing (Indeks IP Internasional 2019).

Agar sistem kekayaan intelektual menjadi efektif, ada tiga elemen kunci:

- ✓ Sistem kekayaan intelektual harus memberikan insentif yang adil dan efektif untuk inovasi.
- ✓ Sistem Kekayaan Intelektual juga harus memberikan kepastian kepada para inovator tentang hak-hak mereka.
- ✓ Sistem Kekayaan Intelektual juga harus menawarkan alat penegakan hukum yang kuat kepada pemegang hak untuk membela HKI yang dilanggar

Negara-negara ASEAN memiliki dasar-dasar IP yang berlaku sejalan dengan komitmen mereka berdasarkan Perjanjian TRIPS WTO, termasuk memberikan perlindungan paten untuk penemuan yang memenuhi syarat untuk jangka waktu 20 tahun. Di luar itu, ada variasi yang cukup besar dari satu negara ke negara lain dalam ruang lingkup hakhak masyarakat adat yang disediakan, kemudahan untuk mendaftarkan mereka, dan penegakannya.

Bagian berikut ini memberikan tinjauan umum tentang bentuk utama kekayaan intelektual (paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang). Ini memberikan penilaian singkat tentang kinerja masing-masing negara dalam melindungi hak-hak ini, mengidentifikasi beberapa masalah utama, dan menetapkan beberapa prinsip untuk reformasi.

Paten

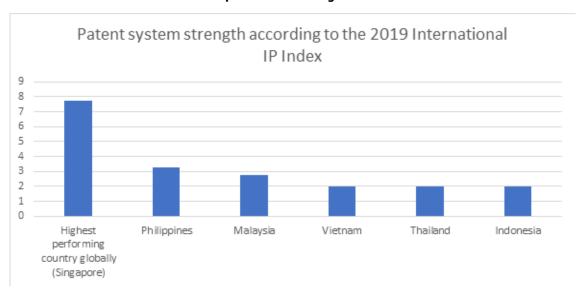
Karena negara-negara ASEAN ingin beralih dari manufaktur bernilai rendah ke manufaktur bernilai tambah dan kegiatan litbang di sektor berbasis pengetahuan, kerangka kerja yang kuat untuk perlindungan dan penegakan paten sangat penting. Paten merupakan pusat dari model bisnis sektor industri bernilai tinggi, termasuk ilmu kehidupan, semikonduktor, pembuatan semua jenis peralatan dan peralatan elektronik, dan ekstraksi gas alam. Di Uni Eropa, sektor paten intensif bertanggung jawab atas 17% dari semua pekerjaan dan 15% dari total PDB. Ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN akan memperoleh banyak manfaat dari standar tinggi perlindungan dan penegakan paten. Sementara semua negara memberikan dasardasar perlindungan paten, ada beberapa bidang kelemahan spesifik, tercermin dalam skor wilayah yang buruk untuk perlindungan hak paten relatif terhadap praktik terbaik global (Gambar 6)

Pemeriksaan Paten Yang Efisien Dan Tepat Waktu

Berdasarkan Perjanjian TRIPS WTO, di mana semua anggota ASEAN adalah penandatangan, jangka waktu paten 20 tahun dimulai ketika aplikasi diajukan ke kantor paten, bukan saat paten diberikan (Perjanjian TRIPS WTO Bagian 5). Paten diberikan secara nasional, dan prosesnya biasanya berada di bawah lingkup kantor paten nasional. Idealnya, kantor paten harus memeriksa aplikasi dengan cepat dan efisien, agar tidak memakan masa paten dan merusak nilainya.

Sayangnya, kantor paten ASEAN tertentu memiliki jaminan aplikasi paten yang signifikan, yang menyebabkan penundaan pemberian paten (Gambar 7). Sebuah survei terperinci tentang masalah ini oleh Pusat Perlindungan Kekayaan Intelektual menemukan bahwa hak paten menjadi masalah global yang sangat akut di **Thailand**, karena dibutuhkan rata-rata lebih dari 14 tahun untuk mendapatkan paten ilmu kehidupan (Schultz, M & Madigan, K, 2016). Faktanya, Thailand secara teratur menerbitkan paten dengan hanya beberapa bulan atau minggu kehidupan tersisa sebelum berakhirnya (meskipun Departemen Kekayaan Intelektual Thailand baru-baru ini mempekerjakan pemeriksa paten tambahan, membantu mengurangi jaminan paten sebesar 20% pada 2018).

Gambar 6 Kekuatan sistem paten sesuai dengan Indeks IP Internasional 2019



Malaysia
Indonesia
Philippines
Viet Nam

Gambar 7 Penundaan Pemeriksaan Paten Di ASEAN

Sumber: Mirandah Asia, Center for Protection of IP

Average years to obtain a patent

Keterlambatan dalam memeriksa masalah paten karena tiga alasan.

- 1. Keterlambatan menyakiti pengusaha dan merusak kemampuan bisnis baru untuk berkembang dan tumbuh (Farre-Mensa et. Al, Sisi Cerah Paten).
- 2. Mereka menyakiti konsumen dan pasien dengan menunda masuknya pasar produk baru, teknologi dan perawatan medis.
- 3. Keterlambatan juga merugikan masyarakat. Menurut Kantor Kekayaan Intelektual Inggris kerugian gabungan dari simpanan di Kantor Paten dan Merek Dagang AS, Kantor Paten Jepang, dan Kantor Paten Eropa merugikan ekonomi global lebih dari \$ 10 miliar per tahun melalui hilangnya investasi, pekerjaan, dan produk (London Economics 2010).

Penundaan pemeriksaan paten terutama mengenai produk-produk tersebut dengan jadwal R&D yang panjang (seperti obat-obatan), dan produk-produk dengan siklus hidup yang pendek (seperti TIK).

Prinsip untuk reformasi

Thailand

Untuk menjaga integritas dan tujuan sistem paten, berfungsinya kantor paten secara tepat harus menjadi prioritas kebijakan.

- Kantor paten nasional harus merekrut lebih banyak dan lebih banyak pemeriksa yang berkualitas untuk menangani masalah keterlambatan dan jaminan simpanan.
- ✓ Paten semakin banyak diajukan di beberapa yurisdiksi, sehingga untuk menghindari duplikasi, kantor paten harus berbagi aplikasi pekerjaan atau jalur cepat yang telah diberikan oleh yurisdiksi yang diakui. Salah satu contoh adalah Jalan Tol Penuntutan Paten (PPH), di mana negara-negara yang berbeda mempercepat pemeriksaan paten jika telah berhasil diajukan ke kantor paten mitra di negara lain dengan kriteria paten yang sama. Perusahaan Kekayaan Intelektual Malaysia (MyIPO) terkenal dalam hal ini dengan memiliki perjanjian PPH dengan Kantor Paten Eropa dan Kantor Paten Jepang.
- Kerjasama Pemeriksaan Paten ASEAN (ASPEC) menunjukkan janji sebagai inisiatif berbagi kerja pemeriksaan paten regional, dan negara-negara anggota ASEAN harus berkomitmen untuk operasi yang sukses terutama dengan meningkatkan kesadaran di antara para pengguna potensial.

Penghargaan Paten Bagi Temuan Bermanfaat

Negara-negara yang berhasil dalam inovasi memungkinkan paten untuk semua bentuk penemuan yang memenuhi kriteria paten, tanpa diskriminasi oleh sektor atau teknologi. Namun, sejumlah negara tidak mengizinkan paten perangkat lunak (misalnya Indonesia dan India), sementara yang lain membatasi paten perbaikan untuk obat-obatan yang ada (lihat di bawah).

Contoh inovasi lanjutan dalam kedokteran termasuk bentuk-bentuk baru obat dengan profil efikasi keamanan yang ditingkatkan, formulasi dan dosis baru yang memberikan peningkatan kepatuhan dan hasil pasien, dan metode baru menggunakan obat yang sudah mapan lebih aman (misalnya formulasi yang dapat diberikan secara oral) dari cefuroxime antibiotik yang awalnya hanya dapat diberikan dengan injeksi (Fed. Cir.2004).

Bentuk penting berikutnya dari inovasi lanjutan ketika penggunaan baru ditemukan untuk obat-obatan yang ada. Ini adalah bentuk inovasi yang sangat penting dan bertanggung jawab atas banyak perawatan terpenting saat ini (Gambar 8). Penelitian menunjukkan bahwa hingga 15% dari indikasi yang diberikan untuk obat pada Daftar Obat Esensial WHO adalah inovasi lanjutan. Menurut beberapa perkiraan, sekitar 90% dari obat-obatan yang paling banyak digunakan oleh pasien disetujui oleh US Food & Drug Administration (FDA) untuk penyakit selain persetujuan awal mereka. Pengulangan obat tidak dapat terjadi sampai telah menjalani serangkaian uji klinis lengkap, yang membutuhkan investasi signifikan - karenanya pentingnya perlindungan paten untuk kategori penemuan ini.

Gambar 8 Obat Yang Telah Direposisi

Drug	Original Indication	New Indication
Amphotericin B	Fungal infections	Leishmaniasis
Aspirin	Inflammation, pain	Antiplatelet
Bromocriptine	Parkinson's diesease	Diabetes mellitus
Finasteride	Prostate hyperplasia	Hair Loss
Gemcitabine	Viral infections	Cancer
Methotrexate	Cancer	Psoriasis, rheumatoid arthritis
Minoxidil	Hypertension	Hair loss
Raloxifine	Cancer	Osteoporosis
Thalidomide	Morning sickness	Leprosy, multiple myeloma
Sildenafil	Angina	Erectile dysfunction, pulmonary hypertension

Terlepas dari pentingnya inovasi lanjutan, negara-negara ASEAN tertentu secara spesifik mencegah paten jenis inovasi farmasi ini.

- Di Filipina, hukum nasional membatasi paten formulasi baru dan penggunaan baru obat-obatan yang ada.
- Indonesia mengadopsi undang-undang paten baru pada tahun 2016 yang juga melarang paten untuk formulasi baru dan penggunaan baru obat-obatan yang ada. Amandemen undang-undang paten 2017 mensyaratkan bahwa inovator menunjukkan "peningkatan manfaat yang berarti" untuk beberapa jenis inovasi farmasi seperti bentuk sediaan baru. Undang-undang ini memasukkan kriteria baru dan tinggi ke dalam sistem paten Indonesia dan menciptakan ketidakpastian bagi investor.

Negara-negara ASEAN yang saat ini menolak perlindungan paten terhadap inovasi penting lanjutan memiliki banyak keuntungan dengan membalikkan arah. *R&D* ke dalam inovasi lanjutan dapat bertindak sebagai entri ke dalam *R&D* obat de novo yang lengkap - perusahaan-perusahaan ASEAN yang masih baru dapat melakukan bukti studi konsep pada molekul yang ada dan melisensikannya kepada perusahaan *R&D* yang lebih mapan, atau sebagai alternatif, molekul berlisensi dari yang didirikan perusahaan farmasi, menyaring dan memvalidasinya, dan melisensikannya kembali ke perusahaan induk untuk pengembangan. Manajemen uji klinis juga merupakan area pertumbuhan bagi banyak negara ASEAN. Model bisnis ini membantu industri lokal meningkatkan rantai nilai dan pada gilirannya menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

India memberikan studi kasus tentang dampak negatif dari kriteria paten terbatas pada inovasi dalam negeri. Undang-undang paten India mencegah paten dari formulasi, komposisi, dan kombinasi obat baru yang ada. Data menunjukkan bahwa perusahaan farmasi generik India (beberapa di antaranya mulai berinovasi), semakin banyak mengajukan paten, melakukan *R&D* dan komersialisasi di luar negeri daripada di India - yang berarti bahwa ekonomi dan pasien India tidak mendapat manfaat (Geneva Network 2019).

Prinsip untuk reformasi

Sistem paten dibangun berdasarkan prinsip non-diskriminasi - menerapkan aturan yang sama untuk semua orang alih-alih mendiskriminasi jenis teknologi, industri, atau lokasi fisik penemuan tertentu (TRIPS Artikel 27: 1). Setiap penemuan harus dinilai berdasarkan kemampuan masing-masing berdasarkan pada aturan paten yang netral dan diterima secara internasional.

- Untuk memenuhi standar internasional untuk paten, pemerintah harus memastikan bahwa semua penemuan dinilai dengan menerapkan kriteria kebaruan paten yang dapat diakui secara internasional, langkah inventif, dan utilitas tanpa diskriminasi atau campur tangan dari lembaga pemerintah selain dari kantor paten.
- Memastikan formulir baru dan penggunaan baru obat-obatan yang ada, dan penemuan perangkat lunak yang memenuhi syarat, memenuhi syarat untuk perlindungan paten, selama memenuhi kriteria yang diakui untuk paten.

Menyediakan Kejelasan Atas Penggunaan Lisensi Wajib

Lisensi wajib merupakan saat di mana pemerintah mengizinkan pihak ketiga untuk menghasilkan produk atau proses yang dipatenkan tanpa persetujuan dari pemilik paten. Perjanjian TRIPS mengizinkan negara-negara untuk meminta izin apa pun, baik untuk manufaktur lokal atau impor. Berhubungan dengan beratnya. Diperlukan untuk hubungan ekonomi internasional dan persepsi investor, beberapa negara telah siap untuk menggunakan alat ini selain dalam situasi luar biasa. Sebagai contoh, beberapa lisensi wajib dikeluarkan oleh negara-negara Afrika dan Amerika Latin dalam persetujuan pandemi HIV / AIDS pada akhir 1990-an hingga pertengahan 2000-an (Kuhn & Beall (2012).

Namun, beberapa tahun terakhir telah terlihat lebih banyak kemauan di antara negaranegara ASEAN untuk mempertimbangkan alat ini untuk mengurangi biaya obat:

- Malaysia pada tahun 2017 mengeluarkan lisensi wajib untuk obat Hepatitis C yang inovatif.
- Indonesia telah menerbitkan sembilan produk farmasi yang dipatenkan (pada tahun 2004, 2007 dan 2012). Selain itu, Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang akan membenarkan lisensi wajib jika pemegang paten tidak memproduksi produk di Indonesia dalam waktu 36 bulan sejak paten diberikan.
- Filipina sedang mempersiapkan pedoman yang akan memperluas cakupan lisensi wajib sebagai bagian dari Undang-Undang Obat-obatan yang Lebih Murah.

Ancaman dan penggunaan lisensi wajib dapat mengurangi pilihan dalam obat-obatan yang tersedia dan merusak akses. Jika suatu negara secara teratur menggunakan atau mengancam perizinan wajib, produsen tidak akan menganggapnya sebagai negara prioritas untuk peluncuran obat-obatan baru. Tanpa peluncuran awal produk-produk lokal yang inovatif, perusahaan-perusahaan generik mungkin tidak dapat memperoleh persetujuan pengaturan yang diperlukan untuk menjual produk-produk mereka, kecuali mereka sendiri bersedia menanggung biaya yang signifikan ini. Perusahaan generik mungkin juga tidak mampu membayar biaya signifikan dari pendidikan kedokteran yang diperlukan untuk penggunaan yang tepat dari produk oleh komunitas perawatan kesehatan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk tersebut terdaftar pada daftar penggantian sektor publik. Ini terutama berlaku untuk obat-obatan dengan populasi pasien yang lebih kecil. Juga tidak mungkin bahwa perusahaan akan berinvestasi dalam kegiatan *R&D*, seperti uji klinis, di negara-negara yang secara rutin membatalkan hak kekayaan intelektual.

Peraturan baru **Indonesia** yang mewajibkan lisensi wajib untuk produk farmasi apa pun yang tidak diproduksi di negara ini sangat meresahkan. Ini akan mengurangi jumlah obat yang tersedia di negara ini, karena beberapa perusahaan akan ingin mengambil bagian dalam usaha patungan berisiko di mana IP tidak dihormati dengan baik. Tanpa upaya ini, Indonesia tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas yang dapat diandalkan untuk mewujudkan potensinya sebagai ekonomi berbasis pengetahuan.

Prinsip untuk reformasi

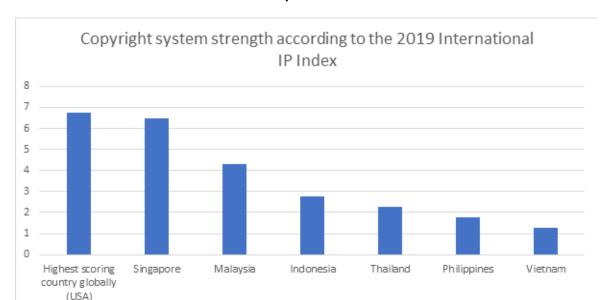
Di masa lalu, lisensi wajib sering digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk harga, bukan sebagai cara untuk menanggapi krisis kesehatan masyarakat yang sah. Dalam kasus lain, pemberitahuan kepada pemegang hak dan proses tidak transparan. Melemahkan hak kekayaan intelektual dengan cara ini menghalangi investasi sektor swasta dalam ekosistem perawatan kesehatan, yang melemahkan pilihan pasien. Karena itu pemerintah harus:

- Batasi penggunaan lisensi wajib untuk keadaan yang benar-benar luar biasa, daripada menjadikannya standar untuk praktik pemerintah
- Kewajiban Lisensi ini tidak dapat dikeluarkan untuk pembenaran yang tidak jelas seperti "kepentingan publik". Berfungsinya hak kekayaan intelektual membutuhkan kepastian, kejelasan, dan kepastian.
- Lisensi Wajib jarang dikeluarkan melalui cara yang adil, transparan dan dapat diprediksi, termasuk melakukan upaya yang tepat untuk mendapatkan otorisasi dari pemegang hak dengan syarat dan ketentuan yang wajar secara komersial.
- Pemberlakuan solusi prinsip sukarela alih-alih paksaan terhadap isu pengadaan pemerintah.

Hak Cipta

Tujuan utama dari hak cipta adalah untuk mendorong dan menghargai penulis, melalui penyediaan hak properti, untuk menciptakan karya-karya baru dan membuat karya-karya itu tersedia untuk umum untuk dinikmati. Dengan memberikan hak eksklusif tertentu kepada pencipta yang memungkinkan pencipta ini untuk melindungi karya kreatif mereka dari pencurian, mereka menerima manfaat dari imbalan ekonomi dan publik menerima manfaat dari karya kreatif yang mungkin tidak dapat dibuat atau disebarluaskan. Selain karya sastra, hak cipta dapat digunakan untuk melindungi, antara lain, musik; gambar bergerak dan karya audio-visual lainnya; rekaman suara; dan kode pemrograman komputer.

Hak cipta sangat penting bagi negara-negara ASEAN, dengan industri kreatif ditetapkan sebagai area pertumbuhan utama. Pada tahun 2018 Filipina menghasilkan film terlaris yang pernah ada (ABS-CBN News, 17 September 2017), sementara itu sedang membangun kekuatan digitalnya yang awalnya dikembangkan dalam Business Process Outsourcing untuk menumbuhkan kegiatan bernilai tinggi seperti desain grafis, pemasaran online dan pengembangan web. Industri kreatif Indonesia merupakan 7,4% dari PDB negara pada tahun 2017, dengan industri film siap untuk ekspansi regional berkat bahasa Bahasa yang dipahami secara luas (The Business Times, 6 April 2018).



Gambar 9 Kekuatan SIstem Hak Cipta Menurut Indeks IP Internasional 2019

Sayangnya, pencurian hak cipta terus menjadi masalah utama di Asia Tenggara, dengan semua negara kecuali Singapura dan sampai batas tertentu Malaysia dengan kerangka kerja hak cipta jauh di bawah standar internasional tertinggi (Gambar 9). Pembajakan online di ASEAN memiliki banyak bentuk termasuk:

- Pengiriman ulang tanpa izin atas pemrograman olahraga langsung daring;
- Kloning perangkat lunak hiburan berbasis cloud, melalui rekayasa balik atau peretasan, ke server yang memungkinkan pengguna untuk memutar konten bajakan online, termasuk game online bajakan;
- Stream ripping untuk mendistribusikan musik secara ilegal melalui internet; Camcording di mana perangkat syuting dibawa ke bioskop dan rekaman yang dihasilkan didistribusikan secara online.

Blackspot hak cipta ASEAN

- Pasar online Indonesia, Tokopedia, Bukalapak, dan IndoXXI.com dimasukkan dalam daftar Pasar Notorious USTR di tahun 2018
- Tingkat penggunaan perangkat lunak tanpa izin di Vietnam adalah 74 persen, menurut Aliansi Perangkat Lunak
- Pembajakan online merugikan industri film dan industri TV Malaysia 2.012 pekerjaan dan 1,327 pekerjaan lebih lanjut dalam rantai nilai pendukungnya pada 2018

Terlepas dari prevalensi pelanggaran hak cipta online, negara-negara ASEAN cenderung tidak memiliki aturan dan kapasitas yang memadai untuk penegakan online. Seringkali tidak ada bantuan tambahan yang memungkinkan pemegang hak untuk menonaktifkan konten yang melanggar ajudikasi yang tertunda secara online, dan kurangnya mekanisme untuk memungkinkan kerjasama antara pihak berwenang dan pemegang hak terhadap pembajakan online, menurut Indeks IP Internasional.

Sebagai contoh, Undang-undang E-Commerce Filipina dan Kode IP menyediakan pelabuhan aman yang luas untuk ISP, membatasi peran mereka dalam memerangi pelanggaran. ISP hanya diminta untuk memblokir akses ke konten jika ada perintah pengadilan (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=225418).

Thailand, bagaimanapun, baru-baru ini mendukung Undang-Undang Hak Cipta untuk memungkinkan pemegang hak untuk bekerja secara langsung dengan ISP untuk menghapus konten yang melanggar, sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan penegakan HKI.

Prinsip untuk reformasi

- Sumber daya tambahan harus dikhususkan untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas, untuk memastikan pengadilan dan peradilan dapat berhasil menegakkan hukum hak cipta yang ada.
- Meningkatkan kesadaran akan dampak dan ilegalitas pembajakan online di kalangan publik
- Menyelidiki penggunaan solusi teknologi untuk menegakkan hak cipta
- Memastikan bahwa tubuh yurisprudensi hak cipta tetap mutakhir dan disesuaikan dengan bentuk media baru saat muncul
- Memperkenalkan undang-undang yang efektif untuk mewajibkan Penyedia Layanan Internet untuk menghapus konten yang melanggar IP dari internet secepat mungkin

Merek Dagang

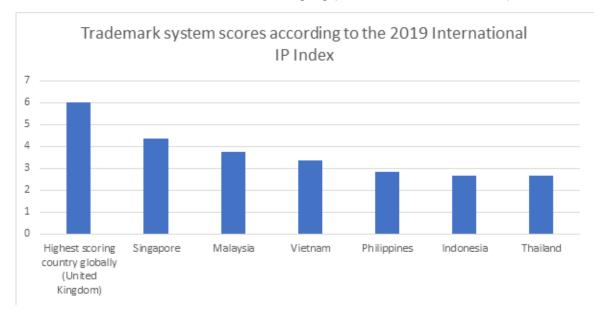
Merek dagang memiliki dua tujuan. Salah satunya guna mencegah persaingan tidak sehat dengan memungkinkan konsumen untuk membedakan dan mengidentifikasi berbagai layanan dan barang. Tujuan kedua yaitu memberikan informasi kepada publik tentang kualitas dan asal produk dan layanan. Oleh karena itu, perlindungan merek dagang sangat penting untuk pengembangan industri lokal, untuk investasi asing dan perdagangan internasional, dan berfungsinya ekonomi pasar yang kompetitif. Negara-negara anggota ASEAN memiliki berbagai merek asli yang berkembang pesat dan populer yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Merek-merek ini mengandalkan perlindungan merek dagang untuk kesuksesan mereka (Gambar 10).



Gambar 10: Merek Konsumer Utama di Asia Tenggara

Terlepas dari pentingnya perlindungan merek dagang yang kuat untuk bisnis lokal dan pengembangan ekonomi, merek dagang secara rutin dilanggar di seluruh ASEAN dengan barang palsu yang tersedia di berbagai produk termasuk barang konsumen, semi-konduktor dan elektronik, suku cadang, bahan kimia, barang IT, barang-barang mewah, obat-obatan dan makanan dan minuman (OECD / EUIPO (2017). Hal ini tercermin skor negara-negara ASEAN yang relatif buruk dalam perlindungan merek dagang dibandingkan dengan praktik terbaik global (Gambar 11).

Gambar 11 Skor Sistem Merek Dagang (Indeks IP Internasional 2019)



Gambar 12 Indeks Global Illicit Trade Environment 2018



Sementara Cina diidentifikasi oleh OECD sebagai produsen barang palsu terbesar (OECD / EUIPO (2017), Malaysia, Vietnam dan Thailand juga merupakan produsen signifikan dalam kategori tertentu (OECD / EUIPO (2017). Sementara itu, banyak pengiriman produk palsu melewati hub transit seperti Singapura dan Hong Kong.

Untuk mengatasi kerugian ekonomi dan sosial yang terkait dengan produk palsu, semua negara di ASEAN telah memiliki kerangka kerja dasar untuk perlindungan merek dagang, dan dalam beberapa tahun terakhir banyak negara telah mengarahkan sumber daya tambahan dan reformasi baru untuk melindungi dan menegakkan hakhak ini dengan lebih baik:

- Thailand telah mengubah Undang-undang Merek Dagangnya untuk mengklarifikasi beberapa aspek prosedural dan berpotensi mempersingkat waktu penuntutan, sementara Undang-Undang Pabean 2017 membawa hukuman baru untuk impor barang palsu, juga mencakup barang dalam perjalanan. Departemen Kekayaan Intelektual (DIP) baru-baru ini memperkenalkan peta jalan kekayaan intelektual yang menyerukan upaya intensif untuk memerangi pembajakan dan pemalsuan.
- Filipina telah bertekad untuk terus melakukan peningkatan dalam memerangi pemalsuan sebagai masalah IP terbesar yang dihadapi oleh negara tersebut.
- Malaysia baru-baru ini memperkenalkan mekanisme dan perjanjian koordinasi penegakan IP untuk meningkatkan kerja sama antarlembaga dalam memerangi pelanggaran merek dagang.
- Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Internasional dan telah mengeluarkan undang-undang baru tentang merek dagang, yang sangat memperkuat tingkat perlindungan saat ini (UU No. 16/2016).
- Vietnam pada tahun 2016 memperbarui kode kriminalnya untuk menjadikan pembuatan dan perdagangan barang-barang yang melanggar HKI menjadi pelanggaran pidana (KUHP No. 100/2015/QH13).

Terlepas dari inisiatif yang menjanjikan ini, ada kekosongan dalam perlindungan merek dagang yang membuat penegakan hukum menjadi menantang.

Di pelbagai negara, ada hambatan hukum dan prosedural untuk mengamankan hak merek dagang. Misalnya, USTR melaporkan bahwa Malaysia dan Filipina memiliki proses oposisi yang lambat yang membatasi kemampuan perusahaan untuk menegakkan merek dagang mereka.

Di banyak negara, pejabat bea cukai tidak diberikan wewenang ex officio untuk menyita barang yang dicurigai, atau jika mereka memiliki kekuatan, tidak dapat menggunakannya untuk barang dalam perjalanan.

Prinsip untuk reformasi

- Mengadopsi praktik terbaik tentang bea cukai termasuk investasi dalam kapasitas di perbatasan dan operasi bea cukai termasuk penggunaan teknologi terbaru;
- Pastikan hukuman yang memadai bagi importir produk palsu, termasuk yang dalam perjalanan;
- Memberlakukan reformasi ke pengadilan untuk mempercepat proses oposisi.

Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakn bentuk kekayaan intelektual yang sangat berharga yang dimiliki oleh hampir semua bisnis di semua industri dan sektor. Hukum rahasia dagang mencakup tiga kategori informasi: (1) informasi teknis, seperti proses industri dan cetak biru; (2) informasi bisnis rahasia, seperti daftar pelanggan; dan (3) pengetahuan, seperti metode bisnis untuk efisiensi.

Di mana ada hukum rahasia dagang yang efektif, pemilik bisnis dapat menggunakan sistem hukum untuk melindungi rahasia. Hal ini dapat menghentikan mantan karyawan atau pesaing yang tidak bermoral untuk mengambil rahasia dan menggunakannya sebagai milik mereka. Namun, dengan digitalisasi informasi, rahasia dagang menjadi lebih rentan terhadap penyalahgunaan. Dengan demikian undang-undang rahasia dagang mulai terkenal karena era digital telah membuat informasi lebih mudah untuk dicuri. Bagi pemerintah, undang-undang rahasia dagang yang efektif adalah bagian penting dari sistem inovasi nasional yang berfungsi dengan baik. Untuk bisnis, melindungi rahasia dagang menjadi semakin penting untuk keputusan investasi dan kesuksesan.

Banyak negara sekarang memahami bahwa perlindungan rahasia dagang yang efektif adalah keunggulan kompetitif utama dan telah meningkatkan hukum mereka (Gambar 13). (https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/Trade-Secrets-English.pdf)

- Malaysia khususnya memiliki kerangka kerja yang kuat di mana rahasia dagang adalah hak IP yang diakui dan memenuhi syarat untuk perlindungan dan penegakan hukum
- Di Indonesia, pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa informasi bisnis rahasia telah diperoleh secara tidak sah oleh pihak yang dicurigai, membuat litigasi menjadi sulit.
- Walaupun undang-undang IP Filipina mencakup 'perlindungan informasi yang tidak diungkapkan' sebagai salah satu hak kekayaan intelektual, ia tidak mendefinisikannya, meninggalkan ketidakpastian besar seputar perlindungan rahasia dagang.
- Vietnam baru-baru ini memperbarui kode IP-nya untuk memasukkan rahasia dagang, meskipun pihak berwenang kurang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus pelanggaran.
- Perlindungan rahasia dagang dimasukkan ke dalam hukum **Thailand** pada tahun 2002.

Prinsip untuk reformasi

 Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan rahasia dagang di kalangan komunitas bisnis

Gambar 13 Perlindungan Rahasia Dagang Menurut Indeks IP Internasional



Perlindungan Regulatory Data

Perlindungan *regulatory data* menjadi semakin penting hak kekayaan intelektual untuk mendorong investasi dalam obat-obatan hewan, bahan kimia pertanian dan obat-obatan biologis.

Perlindungan *regulatory data* mencegah pesaing mengandalkan data yang dihasilkan dalam uji klinis oleh pengembang asli obat-obatan atau bahan kimia pertanian, yang wajib mereka ungkapkan kepada regulator untuk mendapatkan persetujuan pengaturan untuk produk baru. Uji klinis menjadi semakin mahal dan rumit, serta menambah biaya pengembangan obat atau bahan kimia baru secara signifikan.

Oleh karena itu, istilah perlindungan data regulasi yang cukup memberi inovator waktu yang cukup untuk dapat menutup biaya penyusunan data uji klinis, sebelum data tersebut tersedia bagi produsen generik atau biosimilar untuk digunakan dalam aplikasi persetujuan pemasaran mereka sendiri.

Dalam kasus obat-obatan biologis, perlindungan data uji klinis juga penting karena paten saja dapat memberikan perlindungan yang tidak memadai. Ini karena struktur molekuler biologik jauh lebih kompleks daripada obat-obatan yang disintesis secara kimiawi "tradisional", sehingga mustahil untuk mereplikasi biologis asli secara tepat. Mengingat bahwa masing-masing biosimilar sedikit berbeda dari pencetusnya, paten mungkin menawarkan perlindungan terbatas, karena paten diberikan untuk penemuan spesifik dan tidak mencakup variasi yang pasti akan muncul dalam proses pengembangan biosimilar.

Dengan demikian, negara paling inovatif dalam bioteknologi, bahan kimia dan obatobatan hewan semuanya memiliki aturan yang jelas dan mengikat secara hukum untuk melindungi data ini. Bentuk hak kekayaan intelektual ini sangat penting bagi negara-negara yang ingin memasuki rantai nilai R&D melalui penyediaan uji klinis dan layanan terkait. Banyak negara ASEAN menyediakan tidak menyediakan bentuk perlindungan kekayaan intelektual ini (Gambar 14).

Prinsip Reformasi

Berikan ketentuan perlindungan data peraturan yang memadai untuk obat-obatan yang disintesis secara kimia dan biologis, obat-obatan hewan dan bahan kimia.

Gambar 14: Perlindungan Data Resmi Pelbagai Negara

Country	Regulatory data protection	
United States	12 years	
European Union	11 years	
Japan	8 years	
China	Proposes increasing from 6 to 12 years for certain biologic drugs	
Malaysia	5 years; no protection for biologic drugs	
Viet Nam	5 years	
Indonesia	Not available	
Thailand	Not available	
Philippines	Not available	

Sumber: Mirandah Asia; Thomson Reuters Practical Law; China IP Legal Report.

Referensi

- Information Technology and Innovation Foundation (2019) "The Way Forward for Intellectual Property Internationally" available at https://itif.org/ publications/2019/04/25/way-forwardintellectual-property-internationally
- Yi Qian (2006), Do National Patent Laws Stimulate Innovation in a Global Patenting Environment? A Cross-Country Analysis of Pharmaceutical Patent Protection, 1978-2002, 89 Review of Economics and Statistics 436-453
- Albert Hu and Ivan Png, (2013) Patent Rights and economic growth, 65 Oxford Econ. Papers 675-698,
- U.S. Dep't of Commerce (2010), Patent reform: unleashing innovation, promoting economic growth & producing high-paying jobs.
- Park, W. G. and D. Lippoldt (2008), "Technology Transfer and the Economic Implications of the Strengthening of Intellectual Property Rights in Developing Countries", OECD Trade Policy Papers, No. 62, OECD Publishing, Paris.
- Walter G. Park and Douglas G. Lippoldt, "Technology Transfer and the Economic Implications of the Strengthening of Intellectual Property Rights in Developing Countries" (working paper, OECD, Paris, 2008).
- Maskus, "The New Globalisation," 2014, 276 (more than 15 recent economic studies establish the positive effects of patent strengthening on inward trade in high-tech goods, FDI, and licensing)
- Keith Maskus, "Private Rights and Public Problems: The Global Economics of Intellectual Property in the 21st Century" (Washington, D.C.: Peterson Institute, 2012).
- Lanjouw, Jean (2005). "Patents, Price Controls and Access to New Drugs: How Policy Affects Global Market Entry". Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=984259

- Borrell, Joan-Ramon (2005). "Patents and the faster introduction of new drugs in developing countries". Applied Economics Letters, 12 (2), 379–382.
- Kyle, Margaret & Qian, Yi (2014). "Intellectual Property Rights and Access to Innovation: Evidence from TRIPS". NBER Working Paper No. w20799. Available at SSRN: https://ssrn.com/ abstract=2543650
- Cockburn, Iain M., Jean O. Lanjouw, & Mark Schankerman (2016). "Patents and the Global Diffusion of New Drugs." American Economic Review, 106(1): 136-64.
- Jerry Cao & Po-Hsuan Hsu, Patent Signaling, Entrepreneurial Performance and Venture Capital Financing (Working Paper 2010)
- ASEAN Economic Community Blueprint,2025, available at https://www.asean.org/storage/2016/03/AECBP_2025r_FINAL.pdf
- Mahanakorn Partners, "Intellectual Property in Thailand, 2018", available at https://www.mahanakornpartners.com/intellectual-property-in-2018-thailand/
- International IP Index, 2019
- European Union Intellectual Property Office (2016), Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union"
- WTO TRIPS Agreement Section 5, available at https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm
- Schultz, M & Madigan, K, 2016, "The long wait for innovation: the global patent pendency problem", Center for the Protection of Intellectual Property, available at http://sls.gmu.edu/cpip/wp-content/uploads/sites/31/2016/10/Schultz-Madigan-The-Long-Wait-for-Innovation-The-Global-Patent-Pendency-Problem.pdf

- Mirandah Asia, Comparison of Patent Systems of 6 member states of the ASEAN community, 2017, available at https://www.lexology.com/library/detail. aspx?g=e6b9315c-a942-44b7-a621b8198ccfff66
- Joan Farre-Mensa et. al, The Bright Side of Patents, http://papers. ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=2704028 (2016).
- London Economics (2010), Patent Backlogs and Mutual Recognition, https://www.gov.uk/government/ uploads/ system/uploads/attachment_ data/file/328678/p-backlog-report. Pdf
- Glaxo Grp., Ltd. v. Apotex, Inc., 376 F.3d 1339, 1342 (Fed. Cir. 2004).
- Cohen et al, (2006), "Role of followon drugs and indications on the WHO Essential Drug List", J Clin Pharm Therapy 31(6):585-92.
- Solving the problem of new uses by creating incentives for private industry to repurpose off-patent drugs', Benjamin n. Roin, 2014
- Geneva Network (2019) "Copy or compete: how India's patent law harms its own drug industry's ability to innovate", available at https://geneva-network.com/wp-content/uploads/2019/07/WP-Copy-or-Compete-JULY-2019.pdf
- TRIPS Article 27.1
- Kuhn R, & Beall R (2012), "Trends in Compulsory Licensing of Pharmaceuticals Since the Doha Declaration: A Database Analysis", PLoS Medicine, 9(1): e1001154

- "The Hows of Us' makes history as first PH film to cross P600-M mark locally", ABS-CBN News, 17th September 2017, available at https://news.abs-cbn.com/ entertainment/09/17/18/the-hows-of-usmakes-history-as-first-ph-film-to-crossp600-m-mark-locally
- Jokowi turns to creative sectors to spur Indonesia's growth, The Business Times, 6 April 2018, available at https://www. businesstimes.com.sg/governmenteconomy/jokowi-turns-to-creativesectors-to-spur-indonesias-growth
- The E-Commerce Act and IP Code Philippines http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=225418
- Thailand Update: Copyright (Amendment) Bill Revisits Internet Service Providers, Lexology, available at https://www.lexology.com/library/detail. aspx?g=fe505dbe-9991-495a-b872-0d67a0f34bcf
- OECD/EUIPO (2017), Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods, available at https://read.oecd-ilibrary.org/trade/ trends-in-trade-in-counterfeit-andpirated-goods_g2g9f533-en#page13
- Law N° 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications
- Criminal Code No. 100/2015/QH13 of November 27, 2015
- South East Asia IPR SME Helpdesk "Protecting your trade secrets in SE Asia", available at https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/Trade-Secrets-English.pdf

